

ANDI SUWIRTA

Memaknai Peristiwa Sumpah Pemuda dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia dalam Perspektif Pendidikan

INTISARI: Sejarah sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu adalah satu hal. Namun makna dan interpretasi terhadap peristiwa sejarah itu adalah hal lain lagi. Jika yang pertama berkenaan dengan kenyataan objektif dan hanya sekali terjadi; sedangkan yang terakhir merupakan kenyataan subjektif dan dapat diproduksi atau direproduksi untuk kepentingan pendidikan dalam arti luas. Pernyataan ini relevan untuk membahas dua peristiwa sejarah yang dinilai penting oleh bangsa Indonesia, yakni peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan peristiwa Revolusi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Makalah ini berusaha untuk menjelaskan, menafsir, dan memaknai dua peristiwa tersebut dalam perspektif pendidikan. Hal ini penting untuk disadari dan dikritisi bahwa sejarah tentang penulisan sejarah, atau historiografi, adalah wilayah tafsir terhadap realitas dan peristiwa sejarah yang sebenarnya. Masalah-masalah yang berkenaan dengan perspektif, kepentingan, kaedah penelitian, serta gayawacana sangat mempengaruhi produk akhir dari sebuah karya sejarah. Tafsir terhadap peristiwa sejarah, dengan demikian, juga bisa berbeda-beda sesuai dengan jiwa zamannya, sebagaimana ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia, setelah merdeka sampai sekarang, ketika menafsir dan memaknai peristiwa Sumpah Pemuda 1928 dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945.

KATA KUNCI: Memaknai peristiwa, sejarah Sumpah Pemuda dan Revolusi Indonesia, tafsir sejarah, dan perspektif pendidikan.

ABSTRACT: "Interpreting the Events of Youth Pledge and Indonesian Independence Revolution in the Perspectives of Education". History as an event that was actually happened in the past is one thing. But the meaning and interpretation of historical events are something else again. If the first thing is pertaining to the objective reality and only once occurred; whereas the latter thing is a subjective reality and can be produced or reproduced for educational purposes in a broad sense. This statement is relevant to discuss two historical events are considered important by Indonesian people, namely the events of Youth Pledge on October 28, 1928 and the Indonesian Revolution on August 17, 1945. This paper seeks to explain, interpret, and make sense of these two events in the perspectives of education. It is important to realize and criticized that the history of historical writing, or historiography, is a domain of interpretation towards the reality and actual historical events. Issues relating to the perspectives, interests, research methods, as well as mode of discourse affected greatly the final product of a historical work. Interpretation of historical events, thus, can also vary in accordance with the spirit of its age, as shown by the people of Indonesia, after gaining the independence until now, when they have been interpreting and meaning the events of Youth Pledge in 1928 and Indonesian Independence Revolution in 1945.

KEY WORD: Meaning to the events, histories of Youth Pledge and Indonesian Revolution, historical interpretation, and perspectives of education.

PENDAHULUAN

Tafsir politik terhadap sejarah bangsa Indonesia modern acap kali didasarkan pada pandangan mantan Presiden Soekarno

(1945-1967) tentang "trilogi"-nya yang terkenal, ketika beliau dihadapkan pada Pengadilan Kolonial Belanda tahun 1930-an, yakni: Indonesia dahulu (zaman Sriwijaya

About the Author: **Andi Suwirta, M.Hum.** adalah Dosen Senior di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia), Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia; dan Ketua Umum ASPENSI (Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia), periode 2013-2018. Alamat emel yang bisa dihubungi adalah: andisuwirta@yahoo.com

How to cite this article? Suwirta, Andi. (2015). "Memaknai Peristiwa Sumpah Pemuda dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia dalam Perspektif Pendidikan" in *SIPATAHOENAN: South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education*, Vol.1(1) April, pp.57-68. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, APAKSI Bandung, and KEMENPORA RI Jakarta, ISSN 2407-7348. Available online also at: <http://sipatahoenan-journal.com/05-memaknai-peristiwa-sumpah-pemuda-dan-revolusi-indonesia/>

Chronicle of the article: Accepted (March 2, 2015); Revised (March 22, 2015); and Published (April 21, 2015).

dan Majapahit) yang gilang-gemilang, Indonesia sekarang (zaman kolonial Belanda) yang gelap-gulita, dan Indonesia akan datang (zaman kemerdekaan) yang penuh harapan (Abdullah, 2001). Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, tafsir politik terhadap sejarah bangsa Indonesia modern juga mengalami perubahan paradigma. Pada masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998), misalnya, kita diperkenalkan dengan wacana “generasi muda” yang mampu mengubah jalannya sejarah bangsa Indonesia, yaitu: “Generasi 1908, Generasi 1928, Generasi 1945, dan Generasi 1966”. Dan setelah Orde Baru diruntuhkan oleh gerakan mahasiswa, kita juga mengenal istilah “Generasi 1998”.¹

Makalah ini berusaha untuk menjelaskan, menafsir, dan memaknai peristiwa-peristiwa yang dinilai penting dalam sejarah Indonesia modern dalam perspektif pendidikan. Hal ini penting untuk disadari dan dikritisi bahwa sejarah tentang penulisan sejarah, atau historiografi, adalah wilayah tafsir terhadap realitas dan peristiwa sejarah yang sebenarnya (Kuntowijoyo, 1999; dan Sjamsuddin, 2007). Masalah-masalah yang berkenaan dengan perspektif, kepentingan, kaedah penelitian, serta gayawacana sangat mempengaruhi produk akhir dari sebuah karya sejarah. Tafsir terhadap peristiwa sejarah, dengan demikian, juga bisa berbeda-beda sesuai dengan jiwa zamannya, sebagaimana ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia setelah merdeka sampai sekarang ketika menafsir dan memaknai dua peristiwa yang dinilai penting dalam sejarah Indonesia modern, yaitu Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

MEMAKNAI PERISTIWA SUMPAH PEMUDA

Sejarah sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu adalah satu hal. Dan makna serta interpretasi terhadap peristiwa sejarah itu adalah hal

lain lagi (Kuntowijoyo, 1999:16-20). Jika yang pertama berkenaan kenyataan objektif dan hanya sekali terjadi; sedangkan yang terakhir merupakan kenyataan subjektif dan dapat diproduksi atau direproduksi untuk kepentingan pendidikan dalam arti luas. Pernyataan ini relevan untuk membahas salah peristiwa sejarah yang dinilai penting oleh bangsa Indonesia, yakni peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di satu sisi, dan di sisi lain apa makna dari peristiwa itu pada masa-masa selanjutnya setelah Indonesia merdeka sampai sekarang.

Peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 diselenggarakan oleh para pelajar Sekolah Menengah Atas dan Mahasiswa di Jakarta. Mereka mengadakan kongres dan mendiskusikan tentang Indonesia yang dalam proses menjadi dan dibayangkan bersama. Anehnya, sebagaimana dikemukakan oleh Keith Foulcher, bahwa selama kongres dan proses perdebatan itu berlangsung, bahasa pengantar yang digunakan lebih banyak Bahasa Belanda daripada Bahasa Indonesia (Foulcher, 2000:4-17). Mereka kemudian sepakat dengan merumuskan sebuah Sumpah Pemuda yang berbunyi, “*Kami putra dan putri Indonesia: (1) mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; (2) mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; dan (3) menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia*” (Reksodipuro & Soebagijo ed., 1974:69).

Dan ketika peristiwa itu terjadi, ternyata, tidak banyak media massa di Jakarta dan di kota-kota lainnya di Indonesia yang memuatnya sebagai berita dengan kategori signifikan dan penting. Dengan perkataan lain, sebagai suatu peristiwa sejarah pada zamannya, Sumpah Pemuda bukanlah kejadian yang luar biasa. Peristiwa Sumpah Pemuda menjadi penting dan bermakna pada tahun-tahun sesudahnya, yakni tahun 1950/1960-an, dengan demikian jauh setelah peristiwa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1920-an.

Sartono Kartodirdjo (1996:8-9), sejarawan terkenal Indonesia, bahkan menyebut peristiwa Manifesto Politik dari

¹Lihat, misalnya, “Gerakan Mahasiswa di Indonesia”. Tersedia secara online juga di: http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_mahasiswa_di_Indonesia [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2015].

Perhimpunan Indonesia (PI) di negeri Belanda pada tahun 1925 lebih penting dan signifikan daripada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Hal itu disebabkan karena dalam Manifesto Politik dijelaskan tentang dasar-dasar dan modal untuk terwujudnya sebuah negara Indonesia merdeka, yakni: pemerintahan yang demokratis, percaya pada kekuatan sendiri, dan perlunya persatuan bangsa. Sedangkan dalam Sumpah Pemuda hanya dinyatakan tentang perlunya Indonesia yang satu dalam hal bertanah air, berbangsa, dan berbahasa. Konteks peristiwanya juga berbeda, PI adalah organisasi politik yang mencita-citakan – sebagaimana nama majalahnya – *Indonesia Merdeka*. Sedangkan Sumpah Pemuda adalah produk budaya dari perkumpulan para pelajar dan mahasiswa yang longgar dan prihatin terhadap perpecahan kekuatan-kekuatan sosial-politik di Indonesia pada tahun 1920-an.

Lantas, bagaimana kemudian peristiwa Sumpah Pemuda 1928 itu dinilai penting? Bahwa makna “pemuda” lebih menggambarkan kekuatan potensial dan politis bagi kemajuan dan kemerdekaan bangsa, dari pada makna “remaja” misalnya, barangkali di sinilah mulai terjadi “politisasi istilah pemuda” (Abdullah ed., 1985:1). Lebih-lebih pada masa awal revolusi kemerdekaan Indonesia (1945), para pemuda juga tidak mau kalah dengan membuat “sumpah” yang hebat-hebat, misalnya: “*Saya bersumpah tidak akan menikah, sebelum Indonesia merdeka*”; “*Saya bersumpah tidak akan mencukur rambut saya, atau saya bersumpah tidak akan pulang ke rumah, sebelum Belanda angkat kaki dari Indonesia*” (Suwirta, 2000:132).

Berbagai pernyataan “sumpah pemuda” pada masa awal revolusi kemerdekaan itu untuk menunjukkan bahwa makna pemuda adalah pelopor dan harapan masa depan bangsa. Di pundak para pemudalah, seolah-olah, nasib bangsa ini dipertaruhkan, betapapun konsep dan batasan tentang “pemuda” itu sampai sekarang tetap saja tidak jelas dan kabur. Mereka yang usianya sudah relatif tua pun acapkali memiliki

semangat pemuda dan ingin dikategorikan ke dalam kelompok sosial “pemuda” tersebut. Sehingga yang terjadi bukan “Sumpah Pemuda”, melainkan “Sumpah Gue-Muda” atau yakinlah bahwa saya ini masih muda (Suwirta, 2003).

Pentingnya memaknai peristiwa Sumpah Pemuda 1928 sesungguhnya baru terjadi pada tahun 1950/1960-an. Sebagaimana dicatat oleh Keith Foulcher (2000), bahwa Soekarno (sebagai Presiden Republik Indonesia) dan Muhammad Yamin (sebagai Menteri Negara) yang gencar mempopulerkan makna Sumpah Pemuda. Konteksnya adalah karena negara Indonesia diambang perpecahan. Mohamad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI pada tahun 1956, dan kemudian disusul dengan terjadi pemberontakan di daerah-daerah menentang otoritas pemerintah pusat di Jakarta seperti peristiwa PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera tahun 1957 dan PERMESTA (Perjuangan Semesta) di Sulawesi tahun 1958.

Oleh Soekarno dan Muhammad Yamin, peristiwa Sumpah Pemuda 1928 itu dijadikan “senjata politik” untuk menyerang bahwa mereka yang menghendaki perpecahan itu adalah orang-orang yang “hanya mewarisi abu, bukan apinya Sumpah Pemuda”. Begitu juga ketika Presiden Soekarno menggalang kekuatan bangsa Indonesia untuk proyek politiknya: membebaskan Irian Jaya pada tahun 1962 dan konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1963, menjadikan Sumpah Pemuda sebagai ideologi untuk mempersatukan bangsa. Meminjam kata-kata Roeslan Abdulgani (Menteri Negara), Soekarno sering menyatakan bahwa “*peristiwa Sumpah Pemuda bukanlah hasil semedi di bawah pohon kambodja sambil membakar kemenjan, melainkan hasil daripada perjuang jang revolusioner*” (Abdulgani, 1964). Memaknai sebuah peristiwa yang pada zamannya biasa-biasa saja, dengan demikian, telah mengalami perubahan yang signifikan karena tuntutan dan kepentingan zaman yang lain.

Makna Sumpah Pemuda 1928 pada masa

Orde Baru (1965-1998) juga tetap penting. Substansi pesan yang ingin dipertahankan oleh pemerintah Orde Baru adalah perlunya persatuan dan kesatuan. Sebagai rejim yang sentralistis dan otoriter, sebagaimana dinyatakan oleh Benedict R.O'G. Anderson, di mana corak kekuasaan yang ingin menyerap semua kekuatan dari luar itu berlangsung, maka pemerintah Orde Baru memanfaatkan potensi warisan sejarah, budaya, dan bahasa untuk kepentingan kekuasaannya (Anderson, 1991:45-50).

Pemerintah Orde Baru juga mendorong bersatunya elemen-elemen pemuda di bawah kontrol dan perlindungan negara. KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) didirikan pada awal tahun 1970-an, dan para pemimpinnya ada dibawah koordinasi dan/atau patronase Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.² KEMENPORA RI (Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia) terus menggalang dan membina potensi pemuda Indonesia untuk berkiprah di segala bidang kehidupan, demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Slogan yang diciptakan dan populer pada masa Orde Baru adalah “pemuda hari ini, pemimpin hari esok” (Rahadiansyah & Winarno, 2006).

Namun dari sisi implementasi pemaknaannya, peristiwa Sumpah Pemuda kurang fungsional dan relevan bagi kepentingan politik Orde Baru bila dibandingkan, misalnya, dengan pemaknaan Pancasila sebagai ideologi negara. Bagi pemerintah Orde Baru, pemuda memang penting tetapi harus dikendalikan dan dipersatukan dalam satu wadah yang bisa dikontrol oleh negara. Dalam memaknai Pancasila pun – sebagaimana dinyatakan oleh Nugroho Notosusanto (1981), seorang sejarawan militer yang pro Orde Baru – bukan lagi menarasikan siapa penggantinya, tetapi bagaimana pembangunan dimaknai sebagai “pengamalan Pancasila yang nyata” dengan menegaskan bahwa rumusan

Pancasila yang benar dan otentik adalah yang terdapat dalam Pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945, yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahkan Pancasila ini, berbeda dengan Sumpah Pemuda, dalam perkembangannya kemudian disakralkan sedemikian rupa dan ditafsirkan tunggal (di mana pemerintah adalah penafsir yang absyah), sehingga siapa yang melawan Orde Baru dan tidak setuju dengan program-program pembangunannya segera mendapat stigma sebagai “anti Pancasila”.

Kini, memasuki zaman Reformasi, makna peristiwa Sumpah Pemuda masih sayup-sayup terdengar relevansinya. Pada masa-masa awal gerakan Reformasi pada tahun 1998, para mahasiswa sering membuat Sumpah Pemuda Jilid II yang isinya, antara lain, mereka bersumpah untuk menolak penindasan, otoritarianisme, dan korupsi sebagaimana dilakukan oleh pemerintah Orde Baru (Sulistyo, 2002). Walaupun begitu, Indonesia pasca Orde Baru masih dilanda oleh fenomena disintegrasi bangsa. Setelah Timor Timur lepas pada tahun 1999 dan pulau Sipadan-Ligitan juga diklaim oleh Malaysia pada tahun 2002, Indonesia terus didera oleh konflik horizontal, seperti kekerasan antar etnis dan agama, serta konflik vertikal, yakni daerah-daerah melawan pemerintah pusat seperti pada kasus GAM (Geraka Aceh Merdeka) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Jika substansi pesan yang ingin disampaikan oleh Sumpah Pemuda adalah pentingnya persatuan Indonesia dalam hal: bertanah air, berbangsa, dan berbahasa, maka makna peristiwa yang sudah 77 tahun berlalu itu tetap relevan untuk kepentingan membangun solidaritas dan integrasi nasional. Hanya saja, bagaimana mengapresiasi makna itu agar dipahami secara benar dan adil oleh semua anak bangsa, nampaknya perlu instrumen-instrumen politik lain yang lebih kongkrit, misalnya pemerintahan yang demokratis, jujur, bersih, transparan, memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak bangsa, dan adanya supremasi hukum. Tanpa instrumen politik yang kongkrit

²Lihat, misalnya, “Menpora Tantang Pemuda Lahirkan Sumpah Pemuda Baru”. Tersedia secara online juga di: <http://www.fpkb-dpr.or.id/2015/04/30/menpora-tantang-pemuda-lahirkan-sumpah-pemuda-baru/> [diakses di Bandung, Indonesia: 31 April 2015].

seperti itu, peristiwa Sumpah Pemuda akan dimaknai sia-sia, atau hanya menjadi seremonial belaka yang hampa makna.

MEMAKNAI DAN MENGGAMPARASI REVOLUSI INDONESIA

Kajian komparasi dalam sejarah, sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence W. Neuman, adalah fenomena dalam penelitian sosial yang berkembang pesat pada tahun 1970/1980-an. Ia menekankan kajiannya pada menemukan pola-pola perubahan dan kecenderungan struktur sosial yang dialami suatu masyarakat dari waktu ke waktu (Neuman, 2000:382-383). Dengan melakukan kajian komparasi ini maka disiplin ilmu sejarah dapat membangun generalisasi, eksplanasi, dan prediksi dari fenomena sosial yang diamatinya. Pengaruh Ilmu-ilmu Sosial (seperti Sosiologi, Antropologi, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Politik) nampaknya begitu kuat yang mendorong disiplin Ilmu Sejarah untuk melakukan kajian yang bersifat komparatif ini (cf Sjamsuddin, 2007; Suwarta, 2010; dan Madandar Arani, Kafia & Babaie, 2015).

Sekaitan dengan kajian komparasi ini, di dalam disiplin ilmu sejarah, dalam penjelasannya selain dikemukakan hal-hal yang berlaku umum (generalisasi, nomotetik, dan sinkronis) juga hal-hal yang bersifat khusus (partikularistik, idiografik, dan diakronis). Hal ini tidak bisa dielakkan, sebab betapapun disiplin ilmu sejarah itu sudah mendapat pengaruh dari disiplin Ilmu-ilmu Sosial, namun ciri khasnya sebagai bagian dari genre sastra tidak dapat dilepaskan sama sekali (Carr, 2003:70). Dengan demikian, maka disiplin ilmu sejarah juga memiliki fungsi ganda: di satu sisi ia dapat memperkuat sebuah generalisasi, namun di sisi lain ia juga mampu menunjukkan kekhususan yang tidak tercakup dalam generalisasi tersebut.

Hal ini nampak jelas manakala kita membahas komparasi tentang revolusi-revolusi penting di dunia, termasuk revolusi Indonesia. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa revolusi “agung” di Inggris (1688), revolusi Amerika Serikat (1776), revolusi Perancis (1789), revolusi Rusia (1917), dan

revolusi Indonesia (1945) adalah merupakan kejadian-kejadian penting yang membawa perubahan-perubahan dan implikasi sosial-politik yang besar. Kejadian itu ditandai dengan adanya konflik sosial, ketidakpuasan, dan penentangan kelompok yang satu terhadap kelompok sosial lainnya yang sudah mapan. Konflik sosial itu biasanya dalam bentuk kekerasan dan terjadi penggulingan rejim lama (*ancien regime*), termasuk tatanan sosial dan nilai-nilainya, digantikan oleh rejim baru (Brinton, 1974:14). Betapapun bisa jadi, sebagaimana ditegaskan oleh Simon Philpott, bahwa “revolusi bisa saja mengubah *siapa* yang memerintah, tetapi ia tidak mesti mengubah *cara bagaimana* memerintah” (Philpott, 2003:215).

Kecenderungan umum yang lain menyatakan bahwa revolusi itu biasanya dipelopori oleh kelas menengah yang tidak puas. Kategori kelas menengah sendiri bisa sangat beragam. Tapi pada umumnya, mereka adalah dari kelompok sosial yang secara ekonomi kuat dan berpendidikan, serta tidak puas dengan tatanan yang sudah mapan (Zulkarnaen *et al.* eds., 1985:9). Dalam hal ini, golongan bangsawan di Inggris yang tidak puas pada Raja James II; para pemimpin dari 13 koloni di Amerika Serikat yang menentang penjajahan Inggris; golongan *Bourgeois* di Perancis yang menentang Raja Louis XVI; golongan *Bolshevik* yang menggulingkan Tsar Rusia; dan golongan elite terdidik yang menentang penjajahan Belanda di Indonesia, semuanya dapat dikategorikan sebagai “kelas menengah”. Ketidakpuasan dan penentangan itu mereka lakukan dengan mewacanakan ideologi: kemerdekaan, persamaan, keadilan, kemajuan, demokrasi, persaudaraan, hak asasi manusia, dan sebagainya.

Namun, salah satu fungsi komparasi adalah selain untuk menemukan keumuman juga untuk melihat kekhasan. Dalam hal ini tiap-tiap peristiwa revolusi yang terjadi di dunia, termasuk di Indonesia, tentu saja memiliki keunikan dan kekhasannya sendiri. Narasi tentang peristiwa revolusi itu, pada gilirannya, akan merupakan *thick description* (deskripsi mendalam) yang menarik dan unik. Dan tiap bangsa-

bangsa yang dalam sejarahnya mengalami masa revolusi akan melahirkan banyak corak narasi (karya sejarah, sastra, seni, refleksi, dan sebagainya) yang tidak ada habis-habisnya. Revolusi memang kejadian yang mengagetkan dan implikasinya terpatrit dalam memori kolektif, bahkan kenangan individu, suatu bangsa. Tidak banyak bangsa-bangsa di dunia yang dalam perjalanan sejarahnya mengalami revolusi. Revolusi, dengan demikian, telah menjadi *trade mark* suatu bangsa dengan rasa bangga dan percaya diri dalam rangka mencari dan menemukan jati dirinya.

Makna yang bisa dipelajari dari revolusi “agung” (*the glorious revolution*) di Inggris pada tahun 1688 adalah fakta bahwa Raja James II dipandang oleh golongan bangsawan Inggris terlalu otoriter dan mendominasi kekuasaan. Padahal sejak abad ke-13 M (Masehi), Inggris sudah mengenal *Magna Charta*, yang pesan substansinya adalah memberikan ruang kepada golongan bangsawan untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Karena itu, ketika raja bertindak otoriter, mengontrol parlemen dengan ketat, tidak ada jaminan perlindungan terhadap hak milik, dan tidak adanya kebebasan dalam beragama, maka golongan bangsawan mulai menentang Raja James II. Akibat penentangan ini, Raja James II segera menyerahkan kekuasaannya kepada Raja William. Dan tuntutan dari para golongan bangsawan Inggris itu mulai diakomodasi, sehingga menjadikan Inggris sampai sekarang dikenal sebagai negara dengan bentuk kerajaan yang konstitusional (Sachse, 1970:3). Corak pemerintahan yang seperti ini, kemudian, diterapkan di sebagian negara-negara yang pernah menjadi jajahan Inggris.

Adalah menarik bahwa Inggris yang cukup demokratis di negaranya sendiri itu tidak berlaku dalam melaksanakan hubungan kekuasaannya dengan bangsa lain. Itulah yang dialami oleh bangsa Amerika Serikat di bawah hegemoni kekuasaan Inggris. Masyarakat koloni-koloni di Amerika Serikat, yang jumlahnya 13 koloni, diperlakukan tidak demokratis oleh Inggris. Mereka, misalnya, berkewajiban

untuk membayar pajak yang tinggi tanpa memiliki hak-hak untuk menyuarakan aspirasi mereka. Karena itu mereka menolaknya dengan menyatakan “*no tax without representation*”. Sistem ekonomi dan politik juga dimonopoli oleh Inggris, sehingga para pemimpin dari ke-13 koloni di Amerika Serikat itu sepakat untuk membuat “deklarasi kemerdekaan” pada bulan Juli 1776, dan memperjuangkannya agar menjadi masyarakat yang bebas, maju, sama di depan hukum, mampu menentukan nasibnya sendiri, adanya perlindungan terhadap hak hidup dan hak milik, serta secara bersama-sama mewujudkan *welfare state* atau negara kesejahteraan (Morgan ed., 1965:1-4).

Gagasan, pemikiran, semangat, dan pengalaman revolusi di Amerika Serikat itu nampaknya mulai menjalar dampaknya pada masyarakat Eropa, dalam hal ini Perancis. Bahwa revolusi Perancis pada tahun 1789 dalam banyak hal diilhami dan dipengaruhi oleh revolusi Amerika Serikat, tidak ada orang yang membantahnya (Palmer, 1969:131-134). Hanya saja, jika revolusi Amerika Serikat itu merupakan penentangan terhadap kesewenang-wenangan Inggris terhadap 13 koloninya, maka revolusi Perancis adalah penentangan golongan *Borjuis* terhadap kesewenang-wenangan Raja Louis XVI. Golongan *Borjuis*, dengan didukung oleh massa rakyat yang marah karena pajak yang tinggi dan beban hidup yang berat, menyerang benteng Bastille (sebagai lambang otoritarianisme raja), melakukan demonstrasi, serta menghukum raja dan keluarganya yang dinilai sewenang-wenang itu. Golongan *Borjuis* kemudian membentuk pemerintahan baru, mendeklarasikan undang-undang yang akan melindungi hak-hak warga negara, serta menyatakan bahwa kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternite*) adalah merupakan nilai-nilai dasar yang harus terus diperjuangkan dalam revolusi Perancis (Malet & Isaac, 1989).

Baik revolusi di Inggris (1688), revolusi di Amerika Serikat (1776), maupun revolusi di Perancis (1789) merupakan gambaran perubahan dan konflik sosial-politik pada tatanan masyarakat yang modern dengan

akar budaya demokrasi yang relatif kuat. Sekarang bagaimana jika masyarakat yang masih agraris dan belum maju mengalami revolusi yang juga hebat? Itulah nampaknya yang dialami oleh Rusia pada tahun 1917. Karl Marx meramalkan bahwa revolusi proletar itu akan digerakkan oleh kekuatan buruh dalam masyarakat industri yang kapitalis. Namun Vladimir Lenin menunjukkan jalan lain, bahwa revolusi itu bisa dilakukan oleh golongan *Bolsevik* – dengan mengajak golongan masyarakat yang tertindas – untuk menentang kekuasaan Tsar Rusia yang dinilainya otoriter (Service, 2000).

Setelah menggulingkan kekuasaan Tsar Rusia dan kelompok agama, Vladimir Lenin dan golongan *Bolsevik* mendirikan pemerintahan Soviet Rusia dengan dasar komunisme dan demokrasi rakyat, sebuah sistem pemerintahan yang tetap bersifat sentralistis dan otoriter (Sargent, 1986:140-149). Pemimpin-pemimpin Uni Sovyet, setelah Vladimir Lenin, tetap mempertahankan sistem pemerintahan otoriter dan bertangan besi. Negara Soviet-Rusia yang komunis dengan sistem pemerintahan yang sentralistis dan otoriter ini juga akhirnya runtuh pada tahun 1990-an, sehingga diyakini oleh para ilmuwan sosial di Barat bahwa liberalisme dan kapitalisme berhasil memenangkan pertarungannya dalam melawan komunisme dan otoritarianisme (Fukuyama, 2001).

Sekarang, bagaimana dengan revolusi Indonesia? Revolusi Indonesia jelas banyak dipengaruhi oleh gagasan, pemikiran, semangat, dan pengalaman revolusi-revolusi lain di dunia. Hal itu nampak dari wacana yang dibangun oleh para pemimpin Indonesia, baik pada zaman pergerakan nasional maupun pada masa revolusi itu sendiri (Lombard, 1996:91). Inilah salah satu *legacy* pemikiran dan sikap yang penting dari para pemimpin Indonesia, bahwa kemajuan, kesejahteraan, dan kemerdekaan bangsa Indonesia harus dalam konteks “pergaulan” bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian, kualitas kemajuan dan kesejahteraan sebuah bangsa juga tidak boleh diukur menurut parameter bangsa itu sendiri, tapi harus dibandingkan dengan

kemajuan dan kesejahteraan bangsa-bangsa lain di dunia.

Revolusi Indonesia sendiri dipelopori oleh golongan elite terdidik yang mencita-citakan dan membayangkan sebuah komunitas politik (*imagined political community*) yang merdeka, maju, dan sejahtera, sebagai antitesa dari sistem kolonial yang represif, eksploitatif, dan diskriminatif. Cita-cita untuk membangun negara kebangsaan Indonesia, dan citra terhadapnya, disosialisasikan secara efektif melalui media massa dan institusi publik lainnya (Anderson, 1990:5). Hasilnya, tidak hanya semangat nasionalisme itu tersebar luas dan mendalam di kalangan masyarakat Indonesia, tetapi juga berusaha mewujudkan nasionalisme itu dalam praktek revolusi yang sifatnya “nasional”.

Sebagaimana dinyatakan oleh George McTurnan Kahin (1970), dan juga Anthony J.S. Reid (1974), bahwa revolusi Indonesia itu lebih bersifat nasional daripada sosial. Revolusi sosial, di mana terjadi penjungkirbalikkan struktur dan nilai-nilai sosial lama, hanya terjadi di beberapa daerah saja, seperti di Banten, pantai utara Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Aceh (Kahin, 1990); dan itupun tidak berlangsung lama karena pemerintah pusat tidak menghendaknya. Dengan kata lain, pemerintah pusat tidak menghendaki “revolusi sosial” yang terjadi di daerah-daerah, sebab ianya akan mendatangkan keos sosial serta mengganggu keamanan dan ketertiban, suatu batu ujian bagi pemerintahan yang baru dibentuk (Anderson, 1987).

Revolusi Indonesia, dengan demikian, tidak hanya konflik kepentingan antara bangsa Indonesia yang ingin merdeka dengan pemerintah kolonial Belanda yang ingin menguasainya kembali pada pasca Perang Dunia II (1939-1945), tetapi ketegangan dan konflik antara kelompok kepentingan, misalnya antara golongan tua dengan golongan muda; antara militer dan sipil; golongan komunis, Islam, dan nasionalis; serta antara pemerintah pusat dengan daerah (Ricklefs, 1991:317). Dan revolusi yang dinamis dan kompleks itu

berakhir pada tahun 1950, dengan diakuinya kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda.

Dari tahun 1945 hingga sekarang, pemerintah dan bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, setiap tanggal 17 Agustus. Upacara ditandai dengan pembacaan “Teks Proklamasi Kemerdekaan”, dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah-Putih, menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan lagu-lagu nasional lainnya, serta ditutup dengan doa. Bagi orang-orang yang mengalami fase revolusi yang penting itu, mereka mengklaim sebagai “generasi 1945”, yang ingin mewariskan perjuangan dan pengalaman mereka kepada generasi berikutnya. Tapi generasi yang tidak mengalami masa revolusi Indonesia (1945-1950), juga sering menyatakan bahwa mereka ingin membuat sejarah – sebagaimana yang dilakukan oleh “generasi 1945” – sehingga dikenang oleh generasi-generasi berikutnya. Tiap generasi memang punya tantangan yang berbeda-beda, dan tiap generasi pula berhak untuk menulis sejarahnya sendiri.

Akhirnya, Ilmu-ilmu Sosial akan mencoba melihat “persamaan” dan “keumuman” dari semua revolusi yang terjadi di dunia tanpa terlalu memperhatikan “perbedaan” dan “kekhasan” dari masing-masing peristiwa revolusi itu (Sjamsuddin, 1996:193). Dan kita sudah melihat bahwa revolusi ditandai oleh adanya konflik kepentingan antara kelompok sosial yang menghendaki kebebasan dengan mereka yang berusaha mempertahankan tatanan sosial yang sudah mapan. Dalam narasi sejarahnya yang variatif dan menarik, tentu saja, tiap-tiap peristiwa revolusi di dunia menampilkan struktur dan alur cerita yang berbeda-beda. Untuk kepentingan pendidikan sejarah, maka antara keumuman dan keunikan dalam narasi revolusi itu menarik untuk dikaji dan disosialisasikan kepada peserta didik di sekolah.

PERISTIWA SEJARAH DAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN

Tugas sejarawan adalah melakukan penelitian dan diseminasi hasil-hasil penelitian agar masyarakat luas memperoleh

gambaran tentang kelampauan yang objektif dan benar. Sedangkan tugas guru sejarah adalah meramu dan menyajikan secara menarik apa-apa yang sudah diteliti oleh para sejarawan tersebut agar bisa dipahami, diapresiasi, serta diinternalisasi nilai-nilai dan makna sejarahnya oleh peserta didik, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Hasan, 1998; dan Alfian, 2011). Karena itu, menjadi penting dan relevan untuk mengenali teori-teori pendidikan dalam kaitannya dengan proses internalisasi nilai-nilai dan makna sejarah bagi peserta didik di sekolah.

Teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Jerome S. Bruner sangat berguna untuk mengetahui tahapan-tahapan perkembangan intelegensia dan cara berpikir anak-anak pada umumnya (dalam Woolever & Scott, 1988:39-41). Menurut Jean Piaget, berdasarkan observasinya, bahwa terdapat 4 tahapan tentang pertumbuhan intelektual anak-anak, yaitu: (1) tahapan sensori motorik, dari lahir sampai usia 2 tahun, di mana anak-anak dapat menggunakan perasaan dan fisik mereka sebagai alat untuk belajar dan mengenal lingkungannya; (2) tahapan pra operasional, dari usia 2 – 7 tahun, di mana anak-anak sudah dapat berpikir egosentris dan berbicara, mulai mengklasifikasi, betapapun belum logis; (3) tahapan operasional kongkrit, dari usia 7 – 11 tahun, di mana anak-anak dapat berpikir logis dan kongkrit, serta mengenal konsep-konsep ruang, waktu, dan sebab-akibat bekerjanya suatu proses; dan (4) tahapan operasi formal, dari usia 11 tahun sampai dewasa, di mana anak-anak mampu mengaplikasikan berpikir logis dan abstrak tentang peristiwa, gagasan, dan objek, serta mampu merumuskan dan menguji hipotesa, serta membuat generalisasi (dalam Woolever & Scott, 1988:39).

Sementara itu Jerome S. Bruner, betapapun tidak merupakan teori yang sistematis, berusaha mengembangkan teorinya Jean Piaget dengan cara menguji cara berpikir anak-anak ke dalam 3 tahapan model belajar. Menurut Jerome S. Bruner, sebelum usia 3 tahun, anak-anak mengenal cara *enactive*, yaitu bertindak langsung dengan lingkungannya seperti menari,

memanjat, bergerak aktif. Setelah usia 3 tahun, anak-anak mulai mengenal cara *iconic*, yaitu mampu berpikir dan memahami gambar, film, televisi, kartu, peta, dan perjalanan sebagai pengalaman belajar. Pada tahapan selanjutnya (Bruner tidak menyebutkan batasan usia), anak-anak mulai mengenal cara *symbolic*, yaitu mampu menggunakan kata-kata atau symbol-simbol untuk mengemukakan pengalamannya, termasuk mampu membaca buku teks, karya sastra, studi kasus, mampu menulis cerita, laporan, dan mampu mendengarkan pelajaran dari guru, orang lain, atau memperhatikan audio-visual (dalam Woolever & Scott, 1988:40-41).

Teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Jerome S. Bruner tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran sains dan matematika di Indonesia (Sumarmo, 1996:1-4), tetapi juga berguna untuk pelajaran ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, termasuk di dalamnya belajar sejarah. Dari teorinya Jean Piaget dan Jerome S. Bruner itu dapat dilihat bahwa anak-anak di SD (Sekolah Dasar) yang rata-rata usianya 7 – 13 tahun, sesungguhnya sudah dapat belajar tentang sejarah, karena mereka sudah memasuki tahapan berpikir operasional kongkrit dan formal (menurut Piaget) dan cara belajar *iconic* dan *symbolic* (menurut Bruner). Pada tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Jerome S. Bruner tersebut, anak-anak sudah mampu berpikir logis, membaca, dan menulis; mengenal konsep ruang, waktu, dan benda; mampu mendengarkan dan menyimak penjelasan guru; serta dapat menjelaskan hubungan sebab-akibat. Semuanya itu adalah kemampuan-kemampuan yang penting dalam belajar sejarah (Dickinson, Lee & Rogers, 1984:28-30).

Di Indonesia, konsep-konsep tentang sejarah sudah diberikan pada anak kelas 3 SD (Sekolah Dasar), yang berusia 9 tahun. Pada tahapan ini, tentu saja, konsep-konsep sejarah tentang ruang, waktu, dan peristiwa diajarkan secara kongkrit dan yang dikenal dekat dengan lingkungan anak-anak. Misalnya, belajar mengenal kapan anak-anak itu dan anggota keluarganya dilahirkan,

dimana, apa saja kegiatan sehari-hari mereka, dan sebagainya. Anak-anak juga belajar tentang konsep ruang dan waktu dari unit terkecil sampai meluas, misalnya dari keluarga, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara; dengan dibuatkan gambar perkembangannya menurut garis waktu: dahulu, kini, dan nanti. Pendek kata, belajar sejarah di pendidikan dasar mesti diperkenalkan dengan contoh-contoh yang kongkrit dan konsep-konsep yang masih sederhana (Cooper, 1992:13-15).

Pada pendidikan menengah ke atas, yakni SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), di mana anak-anak sudah mampu berpikir logis formal (menurut Jean Piaget) dan *symbolic* (menurut Jerome S. Bruner), maka pelajaran sejarah dapat diberikan dengan memperkenalkan lebih jauh tentang konsep waktu, peristiwa, sebab-akibat, interpretasi, dan narasi sejarah. Struktur dan tahapan berpikir mulai dari kongkrit dan sederhana menuju ke abstrak dan rumit harus tetap dipertahankan. Dalam proses pembelajarannya, akan lebih baik jika guru sejarah menggunakan metode yang kreatif dan variatif, seperti: sosiodrama, tanya-jawab, menggunakan film, karya sastra, mendatangkan nara sumber, dan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah (Wiriaatmadja, 2002:112-121 dan 133-142).

Begitu juga dalam mengenalkan konsep waktu dan peristiwa, guru dapat membuat plot narasi sejarah yang sifatnya “regresif” (mundur dari waktu sekarang ke belakang), sebagaimana telah diperkenalkan contoh kajian sejarahnya secara komprehensif oleh Denys Lombard (1996). Dengan pola seperti ini, peserta didik diperkenalkan dengan konsep “kesinambungan dan perubahan” dalam sejarah antara masa sekarang dalam kaitannya dengan masa lalu, dan juga arahnya ke masa depan. Harus disadari bahwa “masa sekarang” adalah produk dari “masa lalu”, dan “masa sekarang” juga akan memberikan corak dan arah perkembangan di “masa mendatang”.

Sekaitan dengan itu, beberapa cara mengajar sejarah yang menarik dan inovatif dapat dikemukakan sebagai berikut: (1)

Ambil topik yang aktual dan relevan dengan peserta didik; (2) Bahas bagaimana peristiwa itu bisa terjadi: kisahnya, sebab-akibat, interpretasi, dan kaitannya dengan masa lalu; (3) Perlihatkan gambar, peta, rekaman peristiwa, dan foto-foto tentang peristiwa dan tokoh-tokohnya; (4) Lakukan bermain peran atau diskusikan tentang peristiwa dan tokoh-tokohnya tersebut agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam; serta (5) Ambil kesimpulan dan pelajaran dari peristiwa sejarah yang baru saja dibahas dan didiskusikan tersebut.

Guru sejarah bisa melakukan inovasi yang lain dalam memilih metode pembelajaran sejarah, sesuai dengan kemampuan, ketersediaan sarana, biaya, dan minat peserta didiknya. Semuanya adalah untuk membangun kesadaran sejarah peserta didik melalui proses pembelajaran yang menarik dan kreatif di sekolah. Guru sejarah yang baik, kononnya, adalah guru yang mampu membangkitkan semangat dan gairah belajar peserta didiknya. “Banyak jalan menuju Roma”, dan banyak cara juga yang bisa dilakukan oleh guru sejarah agar pelajaran yang berkutat tentang masa lalu itu bisa dihadirkan dalam konteks keninian dan kedisinian, sehingga makna dari peristiwa sejarah tetap penting dan relevan bagi setiap zaman (*cf* Mahasin, Natsir & Hamdan eds., 1985; dan Rahadiansyah & Winarno, 2006).

KESIMPULAN ³

Akhirnya, tugas guru sejarah adalah tidak hanya mengikuti perkembangan pemikiran dan penelitian terkini dari para sejarawan, tetapi yang lebih penting – sesesuai dengan teori-teori dalam pendidikan – adalah meramu, menyederhanakan, dan menyajikan kepada peserta didik tentang

³Makalah ini, sebelum diperbaiki dalam bentuknya sekarang, merupakan jawaban Ujian Tengah Semester dalam matakuliah Kajian Mandiri Pendidikan Sejarah, yang diampu oleh Prof. Dr. Helius Sjamsuddin, di Program Studi Pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), Program Pascasarjana UPI (Universitas Pendidikan Indonesia), pada tanggal 9 November 2003. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong saya untuk menyelesaikan tugas makalah ini, termasuk memperbaikinya sekarang, walaupun seluruh isi dan interpretasi dalam makalah ini tetap menjadi tanggung jawab akademik saya pribadi.

fakta-fakta sejarah yang rumit dan kompleks itu, sehingga menjadi pelajaran yang mudah difahami dan menyenangkan. Sejarah memang disiplin ilmu tentang kelampauan, tapi ianya bisa dihadirkan dalam konteks kekinian dan kedisinian.

Memaknai peristiwa Sumpah Pemuda 1928 dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945, dengan demikian, tetap penting dan relevan. Jika peristiwa pertama berkenaan dengan pentingnya persatuan dan kesatuan, yang dinyatakan dengan pentingnya bertanah air, berbangsa, dan berbahasa “satu”, yaitu Indonesia; maka peristiwa kedua berkenaan dengan idealisme, cita-cita luhur, dan visi mendirikan Indonesia merdeka agar benar-benar menjadi bangsa yang maju, sejahtera, beradab, dan dihormati dalam kancah pergaulan dunia. Indonesia yang bersatu dan maju adalah harapan bersama semua anak bangsa; dan harapan itu bisa terus dihidupkan dalam memori kolektif bangsa melalui, salah satunya, memperingati peristiwa Sumpah Pemuda 1928 dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945.⁴

Bibliografi

- Abdulgani, Roeslan. (1964). *Dihadapan Tunas Bangsa*. Djakarta: Penerbit B.P. Prapantja.
- Abdullah, Taufik [ed]. (1985). *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Penerbit LP3ES, cetakan ketiga.
- Abdullah, Taufik. (2001). *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Alfian, Magdalia. (2011). “Pendidikan Sejarah dan Permasalahan yang Dihadapi” dalam *KHAZANAH PENDIDIKAN: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. III, No.2 [Maret].
- Anderson, Ben. (1987). *Revolusi Pemuda*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, Terjemahan.
- Anderson, Benedict R.O’G. (1990). *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*. London: Verso, 6th edition.
- Anderson, Benedict R.O’G. (1991). “Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa” dalam Miriam Budiardjo [ed]. *Aneka Pemikiran tentang*

⁴**Pernyataan:** Dengan ini saya menyatakan bahwa artikel ini merupakan hasil pemikiran saya sendiri; jadi, ianya bukanlah hasil plagiat, karena sumber-sumber yang saya rujuk sangat jelas dinyatakan dalam Daftar Pustaka. Artikel ini juga belum direviu dan tidak dikirimkan kepada jurnal lain untuk diterbitkan. Saya bersedia menerima hukuman secara akademik apabila di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat ini tidak sesuai dengan kenyataan.

- Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Terjemahan, cetakan ketiga.
- Brinton, Crane. (1974). *Anatomi Revolusi*. Jakarta: Penerbit Bhratara, Terjemahan.
- Carr, David. (2003). "History, Fiction, and Human Time: A Symposium on History and the Limits of Interpretation". Tersedia secara online juga di: <http://www.ruf.rice.edu/~culture/papers/CARR.htm> [diakses di Bandung, Indonesia: 4 November 2014].
- Cooper, Hilary. (1992). *The Teaching of History: Implementing the National Curriculum, Studies in Primary Education*. London: David Fulton Publishers.
- Dickinson, A.K., P.J. Lee & P.J. Rogers. (1984). *Learning History*. London: Heinemann Educational Books.
- Foulcher, Keith. (2000). *Sumpah Pemuda: Makna & Proses Penciptaan atas sebuah Simbol Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Komunitas Bambu, Terjemahan.
- Fukuyama, Francis. (2001). *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Penerbit Qalam, Terjemahan.
- "Gerakan Mahasiswa di Indonesia". Tersedia secara online juga di: http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_mahasiswa_di_Indonesia [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2015].
- Hasan, Said Hamid. (1998). "Kebijakan dan Pelaksanaan Sejarah di Lingkungan Depdikbud". *Makalah* dalam Simposium Pengajaran Sejarah, diselenggarakan oleh Depdikbud RI [Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia] di Jakarta.
- Kahin, George McTurnan. (1970). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Kahin, Audrey R. (1990). *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, Terjemahan.
- Kartodirdjo, Sartono. (1996). "Ideologi Bangsa dan Pendidikan Sejarah". *Makalah* dalam Kongres Nasional Sejarah di Jakarta pada tanggal 12-15 November.
- Kuntowijoyo. (1999). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Bentang Budaya.
- Lombard, Denys. (1996). *Nusa Jawa Silang Budaya: Batas-batas Pembaratan, Jilid 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Terjemahan.
- Madandar Arani, Abbas, Lida Kakia & Zahra Babaie. (2015). "Comparative Perspectives on Educational Assessment System at Primary Schools in Japan and Iran" in *EDUCARE: International Journal for Educational Studies*, Vol.7(2) February, pp.93-102. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UMP Purwokerto, ISSN 1979-7877. Available online also at: <http://educare-ijes.com/comparative-perspectives-on-educational-assessment-system/>
- Mahasin, Aswab, Ismed Natsir & Thamrin Hamdan [eds]. (1985). *Perjalanan Anak Bangsa: Asuhan dan Sosialisasi dalam Pengungkapan Diri*. Jakarta: Penerbit LP3ES [Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial].
- Malet, A. & J. Isaac. (1989). *Revolusi Perancis, 1789 – 1799*. Jakarta: PT Gramedia, Terjemahan.
- "Menpora Tantang Pemuda Lahirkan Sumpah Pemuda Baru". Tersedia secara online juga di: <http://www.fpkb-dpr.or.id/2015/04/30/menpora-tantang-pemuda-lahirkan-sumpah-pemuda-baru/> [diakses di Bandung, Indonesia: 31 April 2015].
- Morgan, Edmund S. [ed]. (1965). *The American Revolution: Two Centuries of Interpretation*. USA [United States of America]: Prentice-Hall, Inc.
- Neuman, Lawrence W. (2000). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston, London, and Toronto: Allyn and Bacon, fourth edition.
- Notosusanto, Nugroho. (1981). *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Palmer, Robert R. (1969). "The French and American Revolutions Considered Together" dalam Edwin Fenton [ed]. *32 Problems in World History: Sources Readings and Interpretations*. Illinois: Scott, Foresman and Company.
- Philpott, Simon. (2003). *Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*. Yogyakarta: Penerbit LKiS, Terjemahan.
- Rahadiansyah & Bajo Winarno. (2006). *Catatan Emas: Kisah 20 Pemuda Indonesia yang Mengukir Sejarah*. Jakarta: Kemenegpora RI [Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia] bekerjasama dengan PT Excelcomindo Tbk, editor oleh Dwi S. Irawanto, cetakan pertama.
- Reid, Anthony J.S. (1974). *Indonesian National Revolution, 1945-1950*. Hawthorn Victoria Australia: Longman.
- Reksodipuro, Subagio & I.N. Soebagijo [eds]. (1974). *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: Yayasan Gedung-gedung Bersejarah.
- Ricklefs, M.C. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Terjemahan.
- Sachse, William L. (1970). *English History in the Making: Reading from the Sources, Since 1689*. Toronto and London: Giun-Blaisdell A Xerox Company.
- Sargent, Lyman Tower. (1986). *Ideologi Politik Kontemporer*. Jakarta: PT Bina Aksara, Terjemahan.
- Service, Robert. (2000). *Lenin: A Biography*. London: Macmillan.
- Sjamsuddin, Helius. (1996). *Metodologi Sejarah*. Jakarta: PPTA Ditjendikti Depdikbud RI.
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sulistyo, Hermawan. (2002). *Lawan! Jejak-jejak Jalanan di Balik Kejatuhan Soeharto*. Jakarta: Penerbit Pensil-324.
- Sumarmo, Utari. (1996). "Piagetian Cross-Cultural Study on Indonesian High-School Subjects". Paper presented in International Conference on Education: Issues in Education of Pluralistic Societies and Responses to the Global Challenges

- Towards the Year 2020, Joint-Committee between IKIP Bandung, Indonesia and La Trobe University, Australia, in Bandung, 11-13 November.
- Suwirta, Andi. (2000). *Suara dari Dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakjat (Yogyakarta) 1945-1947*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Suwirta, Andi. (2003). "Sumpah Pemuda dan Sumpah Gue-Muda: Memaknai Peristiwa Sejarah yang Berubah". *Makalah* dalam Diskusi Ilmiah di HIMAS [Himpunan Mahasiswa Sejarah] di FPIPS UPI [Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia] Bandung, pada tanggal 28 Oktober.
- Suwirta, Andi. (2010). "Dua Negara-Bangsa Melihat Masa Lalunya: Konfrontasi Indonesia – Malaysia (1963-1966) sebagaimana Dikisahkan dalam Buku-buku Teks Sejarahnya di Sekolah" in *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol.3(2) November. Bandung: Minda Masagi Press, ISSN 1979-0112.
- Wiriaatmadja, Rochiati. (2002). *Pendidikan Sejarah di Indonesia: Perspektif Lokal, Nasional, dan Global*. Bandung: Historia Utama Press.
- Woolever, Roberta M. & Kathryn P. Scott. (1988). *Active Learning in Social Studies: Promoting Cognitive and Social Growth*. Boston and London: Scott, Foresman and Company.
- Zulkarnaen, Happy Bone *et al.* [eds]. (1985). *Kelas Menengah dalam Perdebatan*. Jakarta: t.p. [tanpa penerbit].